

ANALISIS ATAS DANA PERIMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Ihyaul Ulum MD., SE.¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi dan perubahan jumlah Dana Perimbangan (DP) dan Belanja Daerah (BD) provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003 serta mengkaji pengaruh DP terhadap BD. 25 propinsi menjadi sampel karena 5 provinsi lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai sample penelitian ini. Data yang dianalisis berasal dari Laporan Realisasi APBD. Propinsi dengan nilai DP 2001 tertinggi adalah Kalimantan Timur dan terendah Gorontalo. BD 2001 tertinggi adalah Jawa Barat dan Gorontalo. DP 2002 tertinggi adalah Papua dan terendah Gorontalo. BD 2002 tertinggi Jawa Timur dan terendah Gorontalo. Tahun 2003, DP tertinggi adalah Papua dan terendah Kalimantan Tengah. Sementara BD tertinggi Jawa Barat dan terendah Kalimantan Tengah.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DP_{2001} berpengaruh signifikan terhadap $Belanja\ Daerah_{2002}$. Dari Model Summary diperoleh nilai $R\ Square\ (R^2) = 0,674$ atau 67,4%, yang berarti bahwa DP_{2001} dapat menjelaskan $Belanja\ Daerah_{2002}$ sebesar 67,4%. Sedangkan sisanya ($100 - 67,4 = 32,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dari output hasil regresi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,897. Pengujian *two tailed* pada $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas (df) $n - 1 = 24$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,064, sehingga dihasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa (H_1) DP tidak berpengaruh terhadap $Belanja\ Daerah$ ditolak. Demikian pula untuk data tahun 2002 dan 2003.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan pada tahun 2001 menentukan bahwa konsentrasi daerah otonom berada di kabupaten/kota, dan bukan di provinsi. Hal ini secara jelas tersurat dalam paket UU Otonomi daerah tahun 1999. Penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) misalnya, untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan – yaitu 25% dari pendapatan dalam negeri APBN. (UU No. 25 tahun 1999).

Pilihan ini dengan sendirinya mengeliminasi 'kekuasaan' pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota sebagaimana sebelum pelaksanaan otonomi daerah. Namun tentu saja pilihan ini bukan tanpa pertimbangan. Surbakti (2001) misalnya, mengidentifikasi setidaknya ada tiga alasan: **Pertama**, sebagian terbesar budaya lokal dalam arti etnik atau subetnik di Indonesia lebih dapat diakomodasi secara politik dalam lingkup wilayah kabupaten atau kota daripada propinsi.

Kedua, dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam lingkup kabupaten/kota, suatu kabupaten/kota akan dapat tumbuh menjadi basis ekonomi lokal, yang berkembang dari, oleh dan untuk warga lokal, dan **ketiga**, makin dekat suatu pemerintahan dengan rakyat, makin mudah bagi rakyat mengontrolnya sehingga tetap berpegang pada asas demokrasi berupa pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Sebagai salah satu bentuk konsekuensi dari pilihan tersebut, negara wajib menjamin keberlangsungan (*sustainability*) dari kabupaten/kota dan propinsi yang tidak memiliki sumber pendanaan mandiri di daerahnya masing-masing. Dengan kata lain: Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, Pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan Pusat dengan daerah.

Berangkat dari rasionalisasi inilah maka dalam UU no 25 tahun 1999 dikenal adanya Dana Perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

¹ Ihyaul Ulum MD., SE., Staff Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Desentralisasi. Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota setiap tahun.

Dana perimbangan diharapkan bukan sebagai sumber pendanaan utama seluruh aktivitas daerah otonom. Namun penelitian Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa besarnya jumlah DAU (yang merupakan bagian dari dana perimbangan) sangat mempengaruhi jumlah belanja daerah kab/kota di Jawa dan Bali. Bahkan, jumlah DAU tahun sebelumnya juga berpengaruh lebih besar terhadap jumlah belanja daerah tahun berikutnya. Hasil yang sama ditemukan Sulistyawan (2004) ketika menguji hal yang sama terhadap kab/kota di Sumatera. Demikian juga ketika dilakukan pengujian secara lebih rinci antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan di kab/kota di wilayah Tapalkuda dan Madura: jumlah DAU menjadi andalan penentuan jumlah belanja daerah, dengan konsentrasi utama pada belanja rutin. (Ulum, 2004).

Mengingat dana perimbangan juga dinikmati oleh pemerintah propinsi, sementara konsentrasi otonomi daerah memilih kab/kota dan bukan propinsi, maka penelitian tentang bagaimana ekspektasi pemerintah propinsi terhadap dana perimbangan menjadi penting. Tingkat ekspektasi ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah propinsi menempatkan dan atau memperlakukan dana perimbangan dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana komposisi dan perubahan jumlah Dana Perimbangan untuk Propinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003?
2. Bagaimana Dana Perimbangan tahun ke- $n-1$ dapat menjelaskan dan atau mempengaruhi Belanja Daerah tahun ke- n ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengkaji komposisi dan perubahan jumlah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Propinsi di Indonesia selama kurun waktu 2001-2003;
2. Untuk mengkaji bagaimana Dana Perimbangan tahun ke- $n-1$ dapat menjelaskan dan mempengaruhi Belanja Daerah tahun ke- n .

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Ulum (2004) tentang DAU dan pengaruhnya terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan kabupaten/kota di wilayah Tapalkuda dan Pulau Madura menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD tahun 2001 dan 2002. Untuk tahun 2001, DAU lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Rutin daripada Belanja Pembangunan. Sedangkan tahun 2002 DAU lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Pembangunan daripada Belanja Rutin.

Demikian juga ketika dilakukan uji regresi dengan lag 1. Jika dibandingkan, DAU_{t-1} lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Pembangunan, daripada Belanja Rutin. Ketika regresi tanpa lag dan dengan lag 1 diperbandingkan, tampak bahwa kekuatan prediksi regresi tanpa lag lebih baik daripada regresi dengan lag 1 untuk jenis Belanja Rutin. Artinya, Belanja Rutin tahun berjalan lebih banyak dipengaruhi oleh DAU tahun berjalan dibandingkan dengan DAU tahun sebelumnya. Sebaliknya, untuk jenis Belanja Pembangunan tampak bahwa kekuatan prediksi regresi dengan lag 1 lebih baik daripada regresi tanpa lag. Artinya, Belanja Pembangunan tahun berjalan lebih banyak dipengaruhi oleh DAU tahun sebelumnya dibandingkan dengan DAU tahun berjalan. (Ulum, 2004).

Penelitian ini mempertegas hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) tentang topik yang sama dengan sampel 90 kabupaten/kota di Jawa dan Bali maupun hasil penelitian Eko (2004) terhadap kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Bedanya, penelitian ini tidak membedakan belanja ke dalam Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan sebagaimana yang dilakukan oleh Ulum (2004) untuk kasus di wilayah Tapalkuda dan Pulau Madura.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *explanatory research*. *Sample* yang diambil adalah propinsi yang telah mempublikasikan laporan realisasi APBD mulai tahun 2001 sampai 2003. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 25 propinsi yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. 5 propinsi yang lain tidak dapat dijadikan sampel karena datanya tidak lengkap.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD propinsi di Indonesia tahun 2001, 2002 dan 2003.

Operasional *Variable* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Dana Perimbangan**, adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan (UU No. 25 tahun 1999).
- b. **Belanja Daerah**, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya.

Proses analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif. Tahapan dalam analisis ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan jumlah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah tahun 2001, 2002 dan 2003
 - b. Menganalisis prosentase perubahan jumlah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah tahun 2001, 2002 dan 2003
2. Analisis Statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah statistik regresi sederhana (*simple regresstion*). Regresi sederhana dipakai untuk melihat pengaruh jumlah Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah secara *cross-section* dengan persamaan: $Y = a + bX + e$, pada $\alpha = 5\%$
Di mana:
Y = ? belanja daerah;
a = konstanta;
b = koefisien regresi;
X = jumlah Dana Perimbangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Jumlah propinsi yang menjadi sampel adalah sebanyak 25. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, jumlah seluruh propinsi adalah 30, sedangkan 5 propinsi yang tidak menjadi sampel adalah propinsi Banten, Maluku, DKI Jakarta, Nanggoe Aceh

Darussalam, dan Kalimantan Barat karena tidak memiliki data yang lengkap mulai tahun 2001 sampai 2003.

Nilai Dana Perimbangan (DP) 2001 tertinggi adalah Rp 1.531.146,83 juta (Provinsi Kalimantan Timur) dan terendah Rp 48.477,46 juta (Provinsi Gorontalo). Jumlah total Dana Perimbangan 2001 adalah Rp 9.831.146,83 juta dan rata-rata Rp 393.245,87 juta. Nilai Belanja Daerah 2001 tertinggi adalah Rp 2.217.836,94 juta (Provinsi Jawa Barat) dan terendah Rp 65.604,30 juta (Propinsi Gorontalo). Jumlah total Belanja Daerah 2001 adalah Rp 15.030.775,03 juta dan rata-rata Rp 601.231,00 juta.

Nilai Dana Perimbangan (DP) 2002 tertinggi adalah Rp 1.847.285,37 juta (Provinsi Papua) dan terendah Rp 133.275,50 juta (Propinsi Gorontalo). Jumlah total Dana Perimbangan 2002 adalah Rp 11.159.426,54 juta dan rata-rata Rp 446.337,06 juta. Nilai Belanja Daerah 2002 tertinggi adalah Rp 2.815.049,77 juta (Provinsi Jawa Timur) dan terendah Rp 150.611,99 juta (Propinsi Gorontalo). Jumlah total Belanja Daerah 2002 adalah Rp 20.395.222,27 juta dan rata-rata Rp 815.808,89 juta.

Sedangkan nilai Dana Perimbangan (DP) 2003 tertinggi adalah Rp 2.181.175,52 juta (Propinsi Papua) dan terendah Rp 130.160,00 juta (Propinsi Kalimantan Tengah). Jumlah total Dana Perimbangan 2003 adalah Rp 12.520.954,39 juta dan rata-rata Rp 500.838,17 juta. Nilai Belanja Daerah 2003 tertinggi adalah Rp 3.089.613,68 juta (Propinsi Jawa Barat) dan terendah Rp 130.891,01 juta (Propinsi Kalimantan Tengah). Jumlah total Belanja Daerah 2003 adalah Rp 23.775.019,49 juta dan rata-rata Rp 951.000,77 juta.

Terjadi perubahan jumlah Dana Perimbangan yang cukup signifikan pada beberapa propinsi dari tahun 2001 ke tahun 2002. Perubahan jumlah ini bisa jadi disebabkan oleh adanya perubahan formula perhitungan Dana Perimbangan untuk propinsi, termasuk diantaranya perubahan formula pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan salah satu bagian dari Dana Perimbangan.

Dari 25 propinsi yang menjadi sample penelitian ini, 8 provinsi diantaranya mengalami penurunan jumlah Dana Perimbangan dari tahun 2001 ke tahun 2002, yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Penurunan tersebut berkisar antara 0,99% sampai dengan 41,81%. Selain 8 propinsi tersebut, terjadi peningkatan jumlah

Dana Perimbangan antara 1.60% sampai dengan 174.92%.

Proporsi yang relatif sama juga terjadi pada perubahan dari jumlah Dana Perimbangan tahun 2002 dengan tahun 2003. Dari 25 propinsi yang menjadi sample penelitian ini, 5 provinsi diantaranya mengalami penurunan jumlah Dana Perimbangan dari tahun 2002 ke tahun 2003, yaitu provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung. Penurunan tersebut berkisar antara 2.24% sampai dengan 51.03%. Selain 5 propinsi tersebut, terjadi peningkatan jumlah Dana Perimbangan antara 5.46% sampai dengan 89%.

Dari 25 provinsi yang menjadi sampel penelitian ini, hanya propinsi Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan jumlah Belanja Daerah dari tahun 2001 ke tahun 2002 sebesar 9.90%. Selain propinsi Kalimantan tengah, terjadi peningkatan jumlah Belanja Daerah antara 0.30% sampai dengan 214.47%. Proporsi yang agak berbeda untuk jumlah Belanja Daerah tahun 2002 ke tahun 2003. Dari 25 provinsi yang menjadi sampel penelitian ini, 4 propinsi diantaranya mengalami penurunan jumlah Belanja Daerah dari tahun 2002 ke tahun 2003 yaitu propinsi Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, dan Sumatera Barat. Penurunan tersebut berkisar antara 10.30% sampai dengan 56.35%. Selain 4 propinsi tersebut, terjadi peningkatan jumlah Belanja Daerah antara 8.66% sampai dengan 42.63%.

Ringkasan perubahan/perkembangan jumlah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah ditunjukkan pada tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1.
Ringkasan Analisis Deskriptif

	Nominal Terendah	Nominal Tertinggi	% Kenaikan Terendah	% Kenaikan Tertinggi
Dana Perimbangan 2001	Gorontalo	Kalimantan Timur	-	-
Belanja Daerah 2001	Gorontalo	Jawa Barat	-	-
Dana Perimbangan 2002	Gorontalo	Papua	Bali	Gorontalo
Belanja Daerah 2002	Gorontalo	Jawa Timur	Kalimantan Tengah	Bangka Belitung
Dana Perimbangan 2003	Kalimantan Tengah	Papua	Kalimantan Tengah	Nusa Tenggara Timur
Belanja Daerah 2003	Kalimantan Tengah	Jawa Barat	Kalimantan Tengah	Nusa Tenggara Timur

Sumber: Hasil Penelitian, 2004 (diolah)

4.2. Analisis atas Dana Perimbangan 2001 terhadap Belanja Daerah 2002

Besarnya koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah = 1,705 dengan konstanta 145490,6. Persamaan regresi yang dibangun dari data tersebut adalah sebagai berikut: $Belanja\ Daerah_{2002} = 145490,6 + 1,705 DP_{2001}$

Angka 145490,6 merupakan konstanta yang berarti bahwa dengan asumsi semua variabel konstan, maka jumlah belanja daerah adalah sebesar 145490,6 satuan. Sedangkan angka 1,705 merupakan koefisien regresi untuk X (DP_{2001}) yang menunjukkan variabilitas/besarnya pengaruh variabel X (DP_{2001}) terhadap Belanja Daerah₂₀₀₂. Artinya, jika DP_{2001} mengalami kenaikan satu (1) satuan maka akan meningkatkan Belanja Daerah₂₀₀₂ sebesar 1,705 (170,5%). Hasil perhitungan koefisien korelasi (R) dan dari *Model Summary* diperoleh nilai $R = 0,821$ yang berarti bahwa terdapat keeratn hubungan antara variabel X (DP_{2001}) dengan variabel Y (Belanja Daerah₂₀₀₂) propinsi di Indonesia. Angka sebesar 0,821 merupakan nilai yang positif dan mendekati hubungan yang sempurna (1); artinya, jika DP_{2001} mengalami peningkatan maka Belanja Daerah₂₀₀₂ juga akan mengalami peningkatan.

Sedangkan nilai koefisien determinasi di atas dan *Model Summary* diperoleh nilai $R\ Square\ (R^2) = 0,674$ atau 67,4 %, yang berarti bahwa DP_{2001} (X) dapat menjelaskan Belanja Daerah₂₀₀₂ (Y) sebesar 67,4 %. Sedangkan sisanya ($100 - 67,4 = 32,6$ %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

4.3. Analisis atas Dana Perimbangan 2002 terhadap Belanja Daerah 2003

Besarnya koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah = 1,763 dengan konstanta 164098,5. Persamaan regresi yang dibangun dari data tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah}_{2003} = 164098,5 + 1,763 \text{ DP}_{2002}$$

Angka 164098,5 merupakan konstanta yang berarti bahwa dengan asumsi semua variabel konstan, maka jumlah belanja daerah adalah sebesar 164098,5 satuan. Sedangkan angka 1,763 merupakan koefisien regresi untuk X (DP_{2002}) yang menunjukkan variabilitas/besarnya pengaruh variabel X (DP_{2002}) terhadap Belanja Daerah₂₀₀₃. Artinya, jika DP_{2002} mengalami kenaikan satu (1) satuan maka akan meningkatkan Belanja Daerah₂₀₀₃ sebesar 1,763 (176,3%).

Hasil perhitungan koefisien korelasi (R) sebagaimana pada tabel 6 di atas dan dari *Model Summary* diperoleh nilai $R = 0,805$ yang berarti bahwa terdapat keceratan hubungan antara variabel X (DP_{2002}) dengan variabel Y (Belanja Daerah₂₀₀₃) propinsi di Indonesia. Angka sebesar 0,805 merupakan nilai yang positif dan mendekati hubungan yang sempurna (1); artinya, jika DP_{2002} mengalami peningkatan maka Belanja Daerah₂₀₀₃ juga akan mengalami peningkatan.

Sedangkan untuk koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai $R \text{ Square } (R^2) = 0,648$ atau 64,8 %, yang berarti bahwa DP_{2002} (X) dapat menjelaskan Belanja Daerah₂₀₀₃ (Y) sebesar 64,8 %. Sedangkan sisanya ($100 - 64,8 = 35,2$ %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Besarnya koefisien regresi variabel X (DP_{2002}), adalah 1,763 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,505. Pengujian *two tailed* pada $\alpha = 5$ % dan derajat bebas (df) $n - 1 = 24$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,064, sehingga dihasilkan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Dengan demikian diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima; yang berarti bahwa variabel X (DP_{2002}) berpengaruh positif terhadap variabel Y (Belanja Daerah₂₀₀₃).

4.4. Pembahasan

Pengujian terhadap jumlah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah propinsi selama tiga tahun pelaksanaan otonomi daerah (2001 s.d. 2003) menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat (mendekati angka 1 – sempurna). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsentrasi otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/

kota, namun tingkat ekspektasi pemerintah provinsi terhadap *kucuran* dana dari pemerintah pusat – melalui Dana Perimbangan – masih sangat tinggi.

Dana Perimbangan terdiri dari empat (4) elemen, yaitu Pos Bagi Hasil Pajak, Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Pos Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pos Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari empat elemen tersebut, hanya dua pos pertama (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam) yang terdapat sedikit unsur kekayaan daerah. Sedangkan dua pos terakhir (DAU dan DAK) merupakan dana *grant* yang diberikan oleh pemerintah pusat secara cuma-cuma kepada daerah.

Sementara itu, dari 25 propinsi yang menjadi sample penelitian ini, sebagian besar ternyata masih sangat mengandalkan unsur DAU dalam Dana Perimbangannya. Artinya, jumlah pos DAU merupakan jumlah yang paling dominan dalam Dana Perimbangan dibandingkan dengan pos-pos yang lain. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Dana Perimbangan lebih merupakan dana *grant* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hanya propinsi DKI Jakarta (yang tidak termasuk dalam sampel penelitian) yang memiliki jumlah Bagi Hasil Pajak lebih tinggi dari jumlah DAU-nya. Sedangkan propinsi Riau dan Kalimantan Timur memiliki jumlah pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang lebih tinggi dari jumlah DAU-nya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Studi ini menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap belanja daerah pada 25 propinsi di seluruh Indonesia. Data yang digunakan adalah data laporan realisasi APBD tahun 2001 sampai dengan 2003.

Dari uraian panjang pada bagian sebelumnya, beberapa kesimpulan yang bisa ditarik berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian antara lain:

1. Mayoritas sampel (17 propinsi) nilai DP 2002 mengalami kenaikan dari DP 2001. Kenaikan tersebut berada pada kisaran 1.60% hingga 174.92%. Hanya 8 propinsi yang mengalami penurunan jumlah Dana Perimbangan dari tahun 2001 ke tahun 2002. Penurunan tersebut berkisar antara 0.99% sampai dengan 41.81%. Proporsi yang relatif sama juga terjadi pada perubahan dari jumlah DP 2002 dengan DP 2003. Hanya 5

- propinsi yang mengalami penurunan antara 2.24% sampai dengan 51.03%, lainnya terjadi peningkatan antara 5.46% sampai 89%.
2. Sedangkan tentang jumlah Belanja Daerah (BD), dari 25 propinsi yang menjadi sampel penelitian ini, hanya propinsi Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan jumlah BD dari tahun 2001 ke tahun 2002 sebesar 9.90%. Selain provinsi Kalimantan tengah, terjadi peningkatan jumlah Belanja Daerah antara 0.30% sampai dengan 214.47%. Proporsi yang agak berbeda untuk jumlah BD tahun 2002 ke tahun 2003. Terdapat 4 propinsi yang mengalami penurunan jumlah antara 10.30% sampai dengan 56.35%. Sisanya, terjadi peningkatan antara 8.66% sampai dengan 42.63%.
 3. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DP_{2001} berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah₂₀₀₂. Dari *Model Summary* diperoleh nilai $R\text{-Square } (R^2) = 0,674$ atau 67,4%, yang berarti bahwa DP_{2001} dapat menjelaskan Belanja Daerah₂₀₀₂ sebesar 67,4% %. Sedangkan sisanya ($100 - 67,4 = 32,6$ %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dari output hasil regresi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,897. Pengujian *two tailed* pada $\alpha = 5$ % dan derajat bebas (df) $n - 1 = 24$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,064, sehingga dihasilkan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa (H_0) DP tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah ditolak. Demikian pula untuk data tahun 2002 dan 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan A. Halim, 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, SNA, Surabaya, Oktober 2003.
- Baswir, R., 1992. *Akuntabilitas Sektor Publik dalam Keterbukaan*, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi II, Yogyakarta, 3-5 Desember.
- Fachrudly, I., 2001. *Penerapan Anggaran Kinerja di Indonesia*, The BIGG Picture edisi 2, Juli.
- Halim, A., 2002. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 181/2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2001*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- , Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- , Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang *Dana Perimbangan*.
- , Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- , Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.
- Ulum., 2004. *Analisis atas Dana Alokasi Umum dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Unpublished.